



# Buletin Parlementaria

Nomor 1151/III/V/2021 • Mei 2021

**PERTEMUAN TIM KOMISI VIII DPR RI  
MA GUBERNUR BENGKULU DAN JAJARAN SERTA STAKEHOLDER**

Dalam Rangka Pembahasan: Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial,  
Papan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar dan Pesantren di Provinsi Bengkulu



**PENYERAHAN BANTUAN  
DPR RI DAN KEMENTERIAN SOSIAL RI  
UNTUK PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM  
DI PROVINSI BENGKULU  
SENILAI : Rp 500.808.300,-**

TERDISI DARI :  
1. MAKANAN SIAP SAJI : 3000 PAKET  
2. MAKANAN ANAK : 1200 PAKET  
3. PASUKAN BENCANA : 300 LEMBAR  
4. MATRAS : 150 LEMBAR  
5. TANGKAP KIBAS : 300 LEMBAR  
6. SELUBUNG MEBAN : 400 LEMBAR

## Komisi VIII Apresiasi Keberhasilan PTM di Bengkulu



3 Harkitnas, Puan  
Maharani Yakini  
Indonesia Bisa Bangkit  
Dari Dampak Pandemi  
Covid 19



5 DPR Minta Seluruh  
Perusahaan  
Vaksinasi Mandiri  
Karyawan



9 772614 339005

BULETIN

# Komisi VIII Apresiasi Keberhasilan PTM di Bengkulu

## Madrasah dan Pondok Pesantren di Provinsi Bengkulu



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Bengkulu, Kakanwil Kementerian Agama dan BPBD di Kantor Gubernur Bengkulu. Foto: Kresno/mvl

**K**etua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi kebijakan pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk tingkat SMA sederajat di Bengkulu yang dinilai berhasil karena tidak menunjukkan penambahan kasus positif Covid-19. Menurutnya, keberhasilan itu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memastikan penerapan protokol kesehatan di semua sekolah dijalankan dengan baik dan disiplin.

“Kami apresiasi Gubernur Bengkulu beserta jajaran bahwa Bengkulu sudah memulai (PTM) sejak 15 Februari 2021. Dengan segala kesiapan dan kekompakan antara pemerintah dan masyarakat, (kegiatan PTM) itu bisa dilaksanakan. Jadi jangan hanya pasar saja yang ramai, sekolah juga harus

”

**KAMI MELIHAT BENGKULU JAUH LEBIH SIAP DARIPADA DAERAH LAIN DAN KETIKA KAMI MELAKSANAKAN RAKOR DENGAN KEMENTERIAN AGAMA DAN BNPB, INSYA ALLAH AKAN BISA DIJADIKAN CONTOH KESIAPAN TATAP MUKA**

aktif kembali dan tentunya dengan prokes yang ketat,” ujar Yandri usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur

Bengkulu, Kakanwil Kementerian Agama dan BPBD di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (19/5).

Yandri menyebut Provinsi Bengkulu bisa menjadi contoh daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sekolah, khususnya untuk madrasah dan pondok pesantren. “Kami melihat Bengkulu jauh lebih siap daripada daerah lain dan ketika kami melaksanakan dengan Kementerian Agama dan BNPB, Insha akan bisa dijadikan contoh kesiapan tatap muka,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan saat ini Bengkulu berada pada posisi zona kuning dan hijau berdasarkan peta penyebaran Covid-19 dan menjadi daerah dengan penurunan kasus terbaik se-Indonesia. Untuk itu ia memastikan aktifitas pembelajaran tatap muka di sebagian besar wilayah Provinsi Bengkulu akan terus dilaksanakan dengan pembagian dan pembatasan jumlah siswa 50 persen.

“Kita rapat bersama Komisi VIII ini terkait dengan kesiapan sekolah tatap muka, baik madrasah, pesantren maupun sekolah umum dan kita menyatakan kalau Bengkulu siap, karena sejak Februari kita sudah memulai dengan kapasitas 50 persen,” ujar Rohidin kepada awak media usai pertemuan. ■ eno/sf



# Harkitnas, Puan Maharani Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Dampak Pandemi Covid-19



Ketua DPR RI  
Dr. (H.C.) Puan Maharani.  
Foto: Kresno/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) setiap 20 Mei 2021 merupakan saat yang tepat untuk bersama-sama menegakkan usaha membangkitkan kehidupan sosial dan ekonomi yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Ia meyakini Bangsa Indonesia pasti bisa melalui tantangan berat tersebut dengan cara bergotong royong, disiplin, dan menjaga kesadaran bersama akan pentingnya mencegah penularan Covid-19. "Kita harus bangkit. Kebangkitan kehidupan sosial, ekonomi, yang terdampak pandemi Covid-19," kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis (20/5).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menambahkan bahwa kebangkitan Bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan peran bersama, serta saling berkontribusi positif antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa kesadaran bersama untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 adalah kunci menghindari terjadinya gelombang kasus Covid-19. Selain itu, Harkitnas juga harus menjadi momentum penguat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai kebhinekaan.

"Hari Kebangkitan Nasional harus jadi pengingat bahwa kita adalah bangsa yang optimis, bangsa yang mampu keluar dari berbagai ujian, dan sejarah telah membuktikan itu. Karena Kita adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang optimistis, dan kita pasti bisa bangkit," tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu. ■ ayu/sf



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

## W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

## REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

## SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

## ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindyia, S.Sos, Erlangga Panji Sarnudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

## FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari

## ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Armanda Prihandini, S. Kom, Larissa Armanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita

## INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

## ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitriyanto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

### ISI BERITA DAN MATERI FOTO

### DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Sufmi Dasco Apresiasi Kebijakan Larangan Mudik Antisipasi Penyebaran Covid-19

**W**akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pemerintah yang dinilai telah berhasil mengantisipasi penyebaran Covid-19 melalui kebijakan penanganan dan pelarangan mudik Idulfitri 2021.

“Pemerintah berhasil dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melarang warga untuk mudik, meskipun masih ada sebagian kecil yang nekat mudik, tapi secara keseluruhan sudah cukup berhasil,” kata Dasco dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (18/5).

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, seandainya pemerintah tidak melakukan mitigasi ancaman Covid-19 melalui pelarangan mudik, angka

Wakil Ketua DPR RI  
Sufmi Dasco Ahmad.  
Foto : Eno/Man



”

**PARA APARAT SUDAH SANGAT KERJA KERAS DI JALANAN, MEREKA RELA PANAS-PANAS-AN DAN TIDAK LEBARAN DI RUMAH DEMI TUGAS NEGARA.**

pengidap Covid-19 bisa berpotensi naik secara drastis. Hal itu menurut dia karena mudik sangat identik dengan keramaian dan kerumunan.

Selain itu Dasco juga mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang telah sungguh-sungguh melakukan

penyekatan di sejumlah kawasan perbatasan sehingga tidak sedikit jumlah kendaraan yang dipaksa harus memutar balik dan batal mudik.

“Para aparat sudah sangat kerja keras di jalanan, mereka rela panas-panas-an dan tidak Lebaran di rumah demi tugas negara. Saya ‘angkat topi’ untuk mereka,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Selain itu, legislator dapil Banten III itu juga menyesalkan masih ada oknum

masyarakat yang nekat mudik bahkan melawan aparat kepolisian ketika diberhentikan, seperti yang videonya viral di sejumlah kawasan, seperti Bekasi, Sukabumi dan Banten.

Dasco menilai, seharusnya masyarakat memiliki kesadaran dan memahami pertimbangan kenapa mudik dilarang karena meskipun semua orang pasti ingin merayakan hari raya bersama keluarga di kampung halaman namun kondisi saat ini tidak memungkinkan. ■ tn/sf

# DPR Minta Seluruh Perusahaan Vaksinasi Mandiri Karyawan

**W**akil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar berharap semua perusahaan bisa mendaftarkan karyawannya untuk dilakukan vaksinasi mandiri. Gus AMI, sapaan akrabnya, mengungkapkan tindakan vaksinasi tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Mengingat, tutur Gus AMI, tercatat selama ini cukup banyak kasus penyebaran Covid-19 dalam kluster perusahaan.

Dalam siaran pers yang diterima **Parlementaria**, Selasa (18/5), Gus AMI menyatakan vaksinasi mandiri diharapkan bisa mencegah terjadinya penularan kasus di lingkup perusahaan dan keluarga karyawan. "Cukup banyak kluster perusahaan dalam penularan Covid-19. Hal itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Maka, vaksinasi mandiri sangat membantu mencegah terjadinya penularan. Kalau para karyawan sehat maka perusahaan akan tetap produktif," ujar Gus AMI.

Gus AMI menekankan vaksinasi mandiri merupakan wujud kontribusi pihak swasta dalam mempercepat dan memperluas jangkauan vaksinasi nasional yang digagas pemerintah. Jika seluruh sektor bergantung kepada pemerintah tentu memberatkan, maka diperlukan pentingnya gotong royong. Perusahaan yang selama ini sudah mendapatkan *input* dari para karyawan, sudah seharusnya memberikan servis dalam hal ini layanan kesehatan kepada para karyawan.

"Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, vaksinasi gotong royong atau mandiri bisa diikuti semua badan hukum atau badan usaha. Karyawan atau karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga bisa diikutsertakan dalam program vaksinasi mandiri ini," tandas Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menegaskan keterlibatan swasta akan mempercepat capaian target vaksinasi nasional. Dengan begitu, pandemi Covid-19 diharapkan bisa semakin cepat diatasi. Sejauh ini, sambung Gus AMI, program vaksinasi Covid-19 masih jauh dari target capaian.

Mengacu pada data Dashboard Vaksinasi Covid-19

Kementerian Kesehatan per Selasa (18/5) ini, capaian vaksinasi masih cukup jauh dari target sasaran.

"Dari total target sasaran sebanyak 40.349.049 orang yang meliputi tenaga kesehatan, lanjut usia dan petugas publik, untuk Vaksinasi Dosis I baru tercapai 34,58 persen atau setara 13.951.975 orang. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 baru tercapai 22,92 persen atau setara 9.247.600 penerima. "Semakin cepat proses vaksinasi dilakukan, harapan kita semua pandemi ini segera berakhir," pungkas Gus AMI. ■ pun/sf

Wakil Ketua DPR RI  
Abdul Muhaimin Iskandar.  
Foto : Gerald/Man



# Komisi I Tetapkan 5 Dewas RRI Periode 2021-2026

**K**omisi I DPR RI menetapkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026. Kelima nama Calon Dewas disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid usai Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*). Usai Uji Kelayakan dan Kepatutan selama dua hari pada Rabu-Kamis (19-20/5), dari 13 calon, Komisi I DPR RI kemudian menetapkan lima calon Anggota Dewas melalui mekanisme musyawarah mufakat.

"Selama dua hari, kami telah melakukan *fit and proper test* atau Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026, dan hari ini Komisi I untuk pertama kalinya telah berhasil mencapai musyawarah mufakat," ujar Meutya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5).

Adapun nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 sebagai berikut; Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (Unsur Masyarakat), Enderiman Butar Butar (Unsur Pemerintah), M.M. Rini Purwandari (Unsur Masyarakat), Mohamad Kusnaeni (Unsur Masyarakat), dan Mohammad Rohanudin (Unsur RRI).

Politisi F-Golkar ini menyampaikan untuk pertama kalinya Komisi I DPR RI mencapai musyawarah mufakat terhadap calon Anggota Dewas LPP RRI. "Suasana yang terjadi dengan kekeluargaan dan sembilan Fraksi secara bulat, meskipun calon yang diajukan bagus dan memiliki kompetensi dan integritas yang baik," tambahnya.

”

**SUASANA YANG TERJADI DENGAN KEKELUARGAAN DAN SEMBILAN FRAKSI SECARA BULAT, MESKIPUN CALON YANG DIAJUKAN BAGUS DAN MEMILIKI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS YANG BAIK**

Meutya menambahkan terjadi diskusi mendalam untuk menentukan lima nama calon Anggota Dewas dan lima cadangan Anggota Dewas, walaupun akhirnya mencapai titik konsensus. "Kompetensi, wawasan kebangsaan dan kita memperhatikan unsur keterwakilan perempuan," jelas legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Sementara itu lima cadangan calon Anggota Dewas LPP RRI antara lain; Yonas Markus Tuhuleruw (Unsur Pemerintah), Mohamad Sujai (Unsur Masyarakat), Gun Gun Siswadi (Unsur Masyarakat), Agnes Irwanti (Unsur Masyarakat) dan Rahadian Ginging M (Unsur RRI). Selanjutnya, Komisi I akan mengirim surat kepada Pimpinan DPR RI untuk disahkan dalam Rapat Paripurna dan kemudian diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. ■ ann/sf



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat *fit and proper test* Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026. Foto: Jaka/Nvl

# Komisi II Sarankan KemenPAN-RB Angkat 75 Pegawai KPK Sebagai PPPK

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera mengangkat 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“KemenPAN-RB dan BKN dapat mengangkat 75 pegawai KPK menjadi PPPK dan segera mengeluarkan SK (Surat Keterangan) bagi para pegawai KPK yang lulus TWK sebagai PNS,” kata Junimart dalam keterangan persnya, Kamis (20/5). Ia menilai langkah tersebut agar status 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak menjadi polemik dan “bola liar” sehingga harus dihentikan dengan mengangkat 75 orang tersebut menjadi PPPK.

Menurutnya, pengangkatan tersebut harus segera dilakukan agar tidak ada lagi gonjang-ganjing dan situasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hobi membuat suasana keruh menyangkut KPK. “Ketua dan Anggota KPK harus konsisten dan konsekuen dengan aturan yang sudah dijalankan dan tidak bisa di

intervensi oleh siapa pun. Harus punya sikap,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Junimart menilai tidak ada yang perlu diperdebatkan karena 75 pegawai KPK tersebut bukan diberhentikan tetapi diarahkan untuk segera menyerahkan tugas masing-masing kepada atasannya. Menurutnya, kalau pegawai KPK tidak lulus TWK, tentu pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK jadi tidak ada yang dirugikan.

“Sekali lagi tidak ada yang perlu diperdebatkan dan menjadi debat kusir sehingga masalah TWK tidak menjadi bola liar padahal bisa ditampung melalui PPPK,” tegas Junimart. Ia menilai tugas utama KPK dalam hal alih status pegawainya hanya menegakkan aturan dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU KPK.

Di sisi lain, tambah legislator dapil Sumatera Utara II itu, hal tersebut dalam rangka menjalankan SK. Ketua KPK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 yang berbunyi “Sebagaimana diktum kesatu agar pegawai KPK menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung hingga menunggu keputusan lebih lanjut.”

“Para pegawai KPK tersebut harus taat atas aturan yang ada. Karena TWK diberlakukan sebagai syarat utama bagi mereka untuk dapat dialihkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya. Junimart menyatakan, semua orang yang bekerja wajib taat pada aturan, bukan memperlakukan aturan tersebut, “itu yang disebut sebagai pekerja yang memiliki integritas,” jelas Junimart. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI  
Junimart Girsang. Foto: Runi/mvl

# Pimpinan dan Dewas KPK Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden

**A**nggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, karena telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus menjadi bahan evaluasi, baik itu bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lulus TWK,” ungkap Eva dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (19/5). Eva mengaku sependapat dengan kebijakan Presiden, dan selanjutnya diharapkan semua pihak saat ini untuk bisa tetap fokus dan mencermati detail persoalan yang ada secara holistik dan integral, tidak boleh sepenggal-sepenggal.

Menurut politisi Partai NasDem itu, bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. “Penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri,” jelas Eva.

”

**SIKAP PRESIDEN JOKOWI TERSEBUT TELAH MENERAPKAN KEPEMIMPINAN MODERN, YAITU MENGUTAMAKAN “CHECK AND BALANCES”**



Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. Foto: Andri/nvl

Dia pun meminta semua pihak untuk segera mengakhiri isu yang seolah-olah menempatkan tarik ulur masalah 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan sebagai persoalan perbedaan sikap antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua KPK Firlil Bahuri.

Menurutnya, 75 pegawai KPK yang diketahui tidak lolos tes, bagaimana pun mereka sudah lama mengabdikan, maka semestinya kita harus tetap menghargai dan memberikan perhatian. “Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75

pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan belum tentu diberhentikan, menurut saya sudah pas dan tepat,” kata Eva.

Menurut dia, sikap Presiden Jokowi tersebut telah menerapkan kepemimpinan modern, yaitu mengutamakan “check and balances”, ada keterbukaan ruang-ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama. Eva menilai Presiden Jokowi mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya. ■ eko/sf



# Komisi IV

## Minta Produksi Bibit Jagung dan Kedelai Ditingkatkan

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri (SHS) agar lebih fokus melaksanakan pembibitan jagung dan kedelai dibandingkan hanya beras. Padahal, saat ini Indonesia sedang kesulitan memperoleh bibit jagung dan kedelai. Dirinya menyayangkan jika PT Pertani dan PT SHS tetap lebih memilih untuk menyalurkan benih padi di Indonesia.

“Kenapa sih susah-susah tanam beras? Yang paling gampang, di Indonesia itu kekurangan bibit benih jagung dan kedelai. Mengapa anda (Pertani dan SHS, **red**) tidak siapkan? Jadi kembalikan (pada fungsi Pertani dan

SHS) seperti dulu lagi,” tegas Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Ketersediaan dan Pengadaan Pangan strategis dengan para direksi BUMN Pangan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/5).

Sebelumnya, Dirut PT Pertani Maryono memaparkan realisasi penyaluran benih padi inbrida sebesar 13.865 ton dengan total "droping" sebanyak 8.350. Senada dengan PT. Pertani, Dirut PT SHS Karyawan Gunarso menjelaskan empat program kerja SHS tahun 2021 nantinya juga fokus pada pembenihan padi.

”

**SIAPKAN BIBIT KEDELAJ DAN BIBIT JAGUNG. INDONESIA SANGAT KEKURANGAN ITU.**

Menanggapi hal tersebut, Sudin menilai jika Pertani dan SHS tetap teguh menjalankan pembibitan padi saja, maka akan membuang potensi besar kedua BUMN untuk hasil yang tidak signifikan. “Siapkan bibit kedelai dan bibit jagung. Indonesia sangat kekurangan itu. Kalau misalnya, tahun ini menyiapkan pembibitan jagung dan kedelai. Maka Insya Allah hasil bibit bisa terserap Kementerian Pertanian di tahun 2022 nanti,” terangnya.

RDP ini dihadiri Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia; Dirut PT Berdikari; Dirut PT Sang Hyang Seri; Dirut PT Pertani; Dirut PT Garam; Dirut PT Perikanan Nusantara; serta Dirut Perum Perikanan Indonesia tidak hanya membahas ketersediaan dan pengadaan pangan strategis, namun juga membahas penggabungan enam perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pangan di antaranya PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri. Rencananya, setelah penggabungan entitas ini, akan dibentuk induk perusahaan (holding). ■ ts/sf

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.  
Foto: Gerald/nvl



# Komisi V Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Larangan Mudik

**K**etua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021 yang tidak berjalan efektif dapat menjadi evaluasi pelajaran berharga bagi pemerintah ke depannya dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Salah satunya yang menjadi sorotan yakni kebijakan pemerintah di satu sisi melarang mudik, namun tetap membuka destinasi wisata. Hal ini yang dianggap gamang.

Demikian ditekankan politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut saat sesi wawancara dialog interaktif

‘Bicara Rasional Bicara Transparan’ via jejaring Zoom yang diselenggarakan oleh TV dan Radio (TVR) Parlemen di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5).

“Larangan mudik diterapkan dalam kondisi khusus terkait dengan upaya memutus mata rantai sebaran Covid-19. Namun demikian, animo masyarakat masih sangat tinggi di mana sebelum tanggal 6 Mei membuat banyak yang menyiasati mudik lebih awal bahkan sampai tanggal 13 Mei. Beberapa titik sekatan juga sampai jebol dan akhirnya mau tidak mau banyak yang lolos mudik. Saya rasa ini

pelajaran berharga bagi pemerintah,” ujar Lasarus.

Lasarus mengingatkan pemerintah ke depannya dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut publik seperti larangan mudik harus betul-betul dimatangkan dengan sebaik-baiknya. Lasarus mengimbau, pemerintah dalam merumuskan kebijakan tidak bisa diputuskan singkat seperti yang terjadi saat memutuskan larangan mudik tahun 2021 yang terbilang mepet.

Seharusnya, saran Lasarus, pemerintah sudah bisa memprediksi dari jauh-jauh hari sejauh mana perkembangan angka persebaran Covid-19 dari seluruh wilayah Indonesia yang menjadi landasan dan dasar utama dalam merumuskan kebijakan larangan mudik. Tidak seperti saat ini, tegas Lasarus. Di mana kebijakan larangan mudik diputuskan di tengah kondisi psikologi masyarakat yang sudah memutuskan untuk mudik.

“Kegamangan pemerintah tahun ini dalam melarang mudik namun membuka tempat wisata membuat masyarakat ragu-ragu dan membuat kerumunan di tempat wisata. Seharusnya, sejak awal tempat wisata juga ditutup jika pemerintah betul-betul bertujuan mencegah adanya kerumunan. Kebijakan hulunya yang harus diperbaiki Mengingat, kebijakan larangan mudik namun membuka tempat wisata tidak sinkron,” tandas legislator dapil Kalimantan Barat II itu.

Namun demikian, Lasarus tetap mengapresiasi kerja keras seluruh *stakeholder* yang telah bekerja *non-stop* dalam memastikan larangan mudik berjalan efektif. “Saya berterima kasih kepada petugas baik dari Kemenhub, Korlantas dan Pemda yang menangani mudik hingga arus balik nanti. Saya harap, ke depannya pemerintah bisa lebih baik dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat tidak bingung dan upaya memutus mata rantai Covid betul-betul dapat berjalan efektif,” pungkas Lasarus lebih lanjut. ■ pun/sf

Ketua Komisi V DPR RI  
Lasarus. Foto: Kresno/nvl



# Pemecatan Direksi KFD, Bukti Keseriusan Negara Tangani Pandemi



Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Foto: Jaka/nvl

**K**etua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyatakan, ketegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam memecat seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD) menjadi bukti ketegasan negara dalam memerangi pandemi Covid-19. Dijelaskannya bahwa Komisi VI DPR RI mengapresiasi sikap dan langkah yang telah diambil Menteri Erick untuk membuat jera para oknum.

“Tentu tindakan *immoral* seperti ini perlu diselesaikan dengan sebuah ketegasan. Yang kami lihat sejauh ini, keseriusan negara dalam melakukan penanganan pandemi perlu diapresiasi, terutama langkah yang diambil jajaran Kementerian BUMN termasuk Pak Erick ya. Ini bukti bahwa tidak boleh ada permainan sekecil apapun dalam upaya mensejahterakan

masyarakat,” terang Faisol dalam keterangan persnya, Rabu (19/5).

Politisi Fraksi PKB ini melanjutkan, Kimia Farma harus lebih berhati-hati dengan adanya peristiwa pemecatan para direksinya. Ia mendorong adanya pengecekan lebih mendetail dalam penanggulangan, baik dari segi alat tes dan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pengecekan ini dibutuhkan untuk mencari tahu adanya kemungkinan pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.

“Sehingga kejadian demikian tidak terulang lagi ke depannya. Ini penting untuk melihat di mana letak kemungkinan dari upaya pelanggaran hukum dan lubang-lubang yang mesti ditutup. Apa yang terjadi di Kualanamu kemarin adalah contoh persoalan yang mesti direspons secara profesional

dan serius, berlandaskan semangat *good corporate governance*,” terang politisi dapil Jawa Timur II ini.

Selain itu, Faisol memandang perlunya diberikan akses kepada Kementerian Kesehatan dan Kepolisian kepada guna mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap alat tes Covid-19 sehingga terjaga kualitasnya. “Secara berkala diberikan akses. Supaya kepastian pelayanan terhadap penanganan Covid-19 ini terjaga kualitasnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memecat seluruh direksi KFD sebagai buntut kasus antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumut. Selain pemecatan dan usai melakukan pengkajian secara komprehensif, Erick juga membuka penyelesaian kasus hukum oleh pihak yang berwenang. ■er

# Komisi VIII Tinjau Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Foto: Sugeng/nvl

**K**omisi VIII DPR RI meninjau Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang merupakan salah satu lembaga Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Sosial. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, tim meninjau proses pendidikan di era pandemi dan sarana prasarana di lingkungan Politeknik Kesejahteraan Sosial, baru-baru ini.

“Kunjungan kali ini merupakan bentuk perhatian penuh Komisi VIII terhadap penanganan masalah sosial. Saat ini dalam legislasi kita telah memfokuskan pekerja sosial dalam dua UU yaitu UU Pekerja Sosial, dan revisi UU Penanggulangan Bencana,” papar

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily.

Menurutnya, peran alumni Politeknik Kesejahteraan Sosial sangat besar dalam penanganan psikososial pascabencana. Saat ini, lanjutnya, Komisi VIII sedang melakukan revisi Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Penanganan lanjut usia sangat penting untuk dibahas karena membutuhkan peran lulusan politeknik kesejahteraan sosial dalam mengelola masalah sosial.

“Jadi dalam kaitan itu kami ingin tahu sejauh mana proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesejahteraan sosial,” ujarnya. Periode lalu, papar Ace, pihaknya telah mengesahkan UU Pekerja Sosial

sebagai bentuk payung hukum bagi profesi pekerja sosial. Karena itu seiring dengan UU tersebut perlu peningkatan kapasitas pekerja sosial.

“(Pekerja) Kita harus punya kompetensi tinggi, jangan sampai kalah bersaing dengan pekerja negara luar. Harus dibina agar memiliki profesionalitas, kompetensi dan memiliki kemampuan bersaing dengan negara luar,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Legislator dapil Jawa Barat II itu menambahkan, keberadaan pekerja sosial sangat dibutuhkan saat ini, karena pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, maka persoalan sosial semakin meningkat seperti tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. ■ si/sf

# Masyarakat Harapkan Kecepatan dalam Penanganan Bencana



Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan penanganan bencana kepada Pemkab Deli Serdang. Foto: Erman/nvl

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan, masyarakat berharap penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat tanpa melalui alur birokrasi yang panjang. Salah satu yang diupayakan Komisi VIII DPR RI dalam mewujudkannya adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Hal ini disampaikan Marwan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan beserta jajaran, dan turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (19/5).

“Mengapa muncul inisiatif untuk merevisi ini, karena berbagai masukan

yang muncul ketika melakukan kunjungan (aspirasi). Ada harapan dari masyarakat maupun pemerintah daerah agar BNPB diperkuat perannya agar mampu menangani kebencanaan dengan baik dan terkendali dengan cepat untuk melakukan penanggulangan,” ucap Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melanjutkan, aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan penguatan BNPB, dikarenakan masyarakat beranggapan alur birokrasi dalam penanganan bencana cukup panjang dan agak berbelit-belit. Sehingga penanganan dampak dari bencana menjadi terkendala.

Sementara pemerintah daerah ragu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada keinginan memulihkan kondisi masyarakatnya pasca bencana dengan teknis yang menjadi urusan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. “Bahkan

daerah itu ada yang menganggap itu akan bermasalah secara hukum karena teknisnya itu tidak boleh ditangani (oleh pemda),” ujarnya.

Dalam perjalanannya, urai Marwan, Komisi VIII DPR RI mengusulkan untuk memasukkan revisi UU Penanggulangan Bencana ke dalam Prolegnas dan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Namun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah, sama sekali tidak menyebut BNPB. Artinya BNPB akan hilang secara kelembagaan. Karena itu, Komisi VIII masih bersikeras agar BNPB diperkuat baik itu secara kelembagaan maupun secara tupoksinya.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan berharap, dengan adanya revisi UU Penanggulangan Bencana ini dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam penanganan kebencanaan.

“Ketika kami menganggap jembatan putus sebagai suatu yang darurat karena masyarakat butuh akses, namun kami tidak bisa berbuat karena itu adalah jembatan (kewenangan) provinsi. Mungkin ini bisa ditindaklanjuti oleh BNPB. Mudah-mudahan kebijakan seperti ini menjadi koreksi bersama demi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI bersama BNPB dan Kemensos juga menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana alam berupa beras reguler sebanyak 15.000 kg kepada Pemkab Deli Serdang. Juga bantuan masker KF94, masker medis, hand sanitizer kepada BPBD Deli Serdang. ■es

# Pemberian Izin TKA China Disesalkan

**T**enaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona seperti sekarang. Menurut Saleh hal ini sangat Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

”

**SAYA BENAR-BENAR MENYAYANGKAN PEMBERIAN IZIN MASUKNYA WNA CHINA KE INDONESIA DI TENGAH SITUASI PANDEMI SEPERTI INI. KEDATANGAN MEREKA INI TENTU DIKHAWATIRKAN BERPOTENSI MEMBAWA VIRUS COVID-19.**

Anggota Komisi IX DPR RI  
Saleh Partaonan Daulay.  
Foto: Arief/nvl



“Saya benar-benar menyayangkan pemberian izin masuknya WNA China ke Indonesia di tengah situasi pandemi seperti ini. Kedatangan mereka ini tentu dikhawatirkan berpotensi membawa virus Covid-19. Belum lagi, masuknya WNA China dimaksudkan untuk bekerja di Indonesia. Sementara, di dalam negeri sendiri, ada banyak PHK dan pekerja yang dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (17/5).

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengimbau Kementerian Ketenagakerjaan agar transparan, di mana para TKA

China itu akan dipekerjakan. Idealnya, menurut Saleh para WNI dulu yang diprioritaskan mendapat pekerjaan di dalam negeri. Kualitas pekerja lokal tidak kalah dengan pekerja asal China. Indonesia sendiri, tambah Saleh kini sedang menghadapi wabah Covid-19 yang belum selesai. Bila kelak, sudah selesai bisa dipikirkan lagi soal TKA asal China itu.

“Sangat disayangkan, protes dan penolakan masyarakat seakan tidak didengar oleh pemerintah. Semakin ditolak, malah semakin banyak yang datang. Bahkan, sekali penerbangan bisa membawa ratusan rombongan.

Menurut saya, perlu dikalkulasi untung rugi menggunakan

TKA ini di Indonesia. Sebab, sejauh ini, saya belum pernah mendengar bahwa kedatangan mereka meningkatkan pemasukan negara. Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN,” tutur Saleh. ■ mh/sf

# KEM-PPKF 2022 Akan Jadi Pondasi Untuk Transformasi Ekonomi Jangka Panjang



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Geraldi/nvl

**P**emerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021. KEM-PPKF tersebut akan digunakan sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

“Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, saya selaku Ketua Komisi XI DPR RI akan mengawal pembahasan KEM-PPKF sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dengan transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada kepada publik di tengah keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,” terang Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto Rapat Paripurna DPR

RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5).

Pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020 yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, turunnya daya beli masyarakat, dan penurunan sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih akan dilakukan pada 2022, sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Pada penyampaian KEM-PPKF tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kebijakan fiskal tahun 2022 mengangkat tema, Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. “Tema RKP Tahun 2022 sejalan dalam mencapai visi Indonesia Tahun 2045. Agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran

kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022, termasuk reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pasca pandemi Covid-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi nasional,” tegas politisi Senior Fraksi Golkar itu.

Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut di tahun 2021, masih memberikan dampak terhadap perekonomian dunia dan nasional. Harapan terhadap pulihnya perekonomian global juga memberikan dampak terhadap pulihnya perekonomian nasional yang ditunjukkan melalui berbagai indikator yang ada.

“Program vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* tetap harus dilakukan di tahun 2021, termasuk dengan pelaksanaan APBN 2021 sebagai countercyclical dan eksekusi program PEN 2021 menjadi dasar dan landasan perumusan kebijakan dan sasaran makro pembangunan di tahun 2022,” imbuh legislator dapil Jateng VIII itu.

Dito menambahkan, sampai dengan Triwulan I-2021, penerapan PPKM Mikro telah memberikan dampak terhadap *leading indicator* ke arah perbaikan dan terus menguat. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2021 sebesar 0,74 persen (yoy) lebih rendah dari kontraksi triwulan IV 2020 sebesar 2,19 persen (yoy) menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian terus terakselerasi. “Oleh sebab itu, *extra effort* pelaksanaan kebijakan tahun 2021 harus terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk dampak dari pelaksanaan UU Cipta Kerja sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional” pungkas Dito. ■ alw/sf

# BKSAP DPR Ajak Parlemen Dunia Dukung Palestina

**B**adan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengambil langkah lanjutan melalui inisiasi peluncuran pernyataan bersama (Joint Statement) yang mengajak anggota parlemen dari seluruh dunia mengutuk kebrutalan Israel. Hal tersebut guna menyikapi kondisi di Palestina yang sudah dua pekan diserang oleh Israel.

“Kami Pimpinan BKSAP menyampaikan dua hal. Pertama, kembali dan akan terus sangat mengutuk tindakan barbar Israel. Kedua, kami akan terus bergerak sesuai kapasitas dan otoritas kami untuk menghentikan kekerasan tak berpriskemanusiaan Israel,” tegas Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menyampaikan pernyataan bersama secara virtual, Rabu (19/5).

Lebih lanjut, BKSAP menyesalkan pascapertemuan level menteri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) beberapa hari lalu yang ternyata belum bisa menghentikan aksi brutal Israel.

“Kami berupaya menggalang dukungan sebanyak mungkin agar para anggota parlemen dari seluruh dunia dapat menandatangani pernyataan bersama tersebut,” ujar Fadli yang juga Wakil *Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds*, sebuah institusi yang menghimpun para anggota parlemen dari seluruh dunia yang mendukung Palestina.

Pernyataan bersama itu berisi antara lain; mengutuk keras agresif ilegal Israel yang menyebabkan korban tewas termasuk wanita dan anak-anak, mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil dan segera menegakkan hukum dan ketertiban



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Azka/nvl

internasional, prihatin atas perluasan permukiman ilegal Israel.

Serta mendesak Perhimpunan Parlemen Dunia (IPU) untuk berpartisipasi mengatasi situasi memburuk di Palestina, mendesak kemudahan akses bantuan kemanusiaan, menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap berkomitmen terhadap proposal ‘solusi dua negara’.

Berikutnya, mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan regional, dan mendukung semua upaya diplomatik yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan langgeng di Timur Tengah.

Sementara itu Wakil Ketua BKSAP Sihar Sitorus (PDI-Perjuangan) mengingatkan ihwal korban yang terus berjatuh yang harus menjadi perhatian bersama. Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (PKS) juga menegaskan dukungan Indonesia baik itu pemerintah, parlemen,

dan konstitusi akan selalu bersama rakyat Palestina.

Pimpinan lain, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma (Demokrat) mengajak untuk selalu mendoakan rakyat Palestina. Sementara Wakil Ketua BKSAP Ahmad Hafisz Tohir (PAN) menegaskan harus ada langkah konkrit untuk mendukung Palestina karena tampaknya Israel sudah tidak takut terhadap tekanan internasional.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Palestina, Syahrul Aidi Maazat, meminta media lebih obyektif saat memberitahukan isu Palestina dan mengingatkan urgensi menjaga hubungan baik dengan Palestina. Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra sangat penting bagi perjuangan Palestina. ■

ah,bia/sf



# GKSB DPR Dorong Pemerintah Galang Dukungan Politik Untuk Palestina



Ketua GKSB Parlemen Indonesia – Palestina Syahrul Aidi Maazat dengan Dubes Palestina Zuhair Al Shun. Foto: Runi/Man

**K**onflik berdarah antara Israel dan Palestina di Tepi Barat Palestina sepekan terakhir memantik sikap banyak negara, begitupun Indonesia. Namun sikap dunia internasional tersebut belum sepenuhnya menawarkan

solusi jangka pendek dan panjang untuk Palestina.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia – Palestina Syahrul Aidi Maazat menilai Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia memiliki peran besar

menggalang dukungan internasional baik secara politik, ekonomi bahkan sifatnya bantuan kemanusiaan.

“Saat ini Palestina sangat berharap peran Indonesia di dunia internasional, terutama soal politik. Jika resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat dikawal karena tekanan Amerika Serikat yang kuat, Indonesia dapat berperan di luar itu. Seperti di negara G-20, OKI, ASEAN atau hubungan bilateral dengan negara muslim atau negara yang prihatin,” terang Syahrul Aidi dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (17/5).

Anggota Komisi V DPR RI ini menilai Israel harus ditekan dari semua sisi dan jangan hanya berharap melalui PBB saja. Selain politik, Indonesia dalam waktu dekat ini akan mendorong bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk mitigasi pasca konflik, West Bank, lanjut politisi PKS tersebut, saat ini situasinya ibarat penjara besar yang dikepung Israel dari segala sisi.

“Palestina sangat kesulitan saat ini. Indonesia dapat berperan dengan cara menggalang bantuan kemanusiaan dari negara muslim atau negara pendonor. Bantuan ini digunakan untuk perbaikan pasca konflik atau saat konflik,” terang legislator dapil Riau II tersebut.

Di akhir pernyataannya, Syahrul menjelaskan, tindakan nyata dari Indonesia, khususnya Pemerintah Indonesia, dapat dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk Palestina. ■ hal/sf

# Kenaikan PPN Wajib Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Tahun 2021



Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Runi/Man

**K**etua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah, secara khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2022 wajib memperhatikan pertimbangan khusus. Dengan catatan, pemerintah harus mencermati sejauh mana target pertumbuhan Ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 dapat tercapai (Q2)

Jika tren pertumbuhan terus meningkat sampai di Q4 di kisaran angka 5 persen, maka dapat dikatakan layak bagi pemerintah untuk menaikkan PPN pada tahun

2022 mendatang. Demikian dipaparkan Said kepada awak media usai menghadiri konferensi pers Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan setelah Rapat Paripurna DPR RI, di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5).

"Mengenai PPN, kami akan lihat di Q2 ini apakah target pertumbuhan 7 persen yang diinginkan pemerintah tercapai. Banggar memperkirakan 5 sampai 5,5 persen paling tinggi. Jika sampai di Q4 bisa sampai 5 persen maka pada tahun 2022 layak bagi pemerintah untuk menaikkan PPN. Karena dalam rangka menggulirkan *demand* yang

lebih tinggi, mau tidak mau dalam menjaga fiskal maka pemerintah layak menaikkan PPN," ujar Said.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menuturkan, berdasarkan pembahasan antara DPR dan Kemenkeu, PPN akan merujuk pada skema multi tarif. Skema multi tarif PPN yang terdiri pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang-barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara, pengenaan tarif lebih tinggi untuk barang mewah/sangat mewah.

Selain itu, Said menilai kerangka usulan APBN 2022 dari pemerintah masih bersifat normatif. Said mengungkapkan, hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan masih di bawah 6 persen. Menurut Said, pemerintah bisa lebih berani mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo yakni ekonomi domestik tumbuh di kisaran 6-7 persen.

"Namun, saya memahami pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai keadaan. Dimana, pada 2022 defisit APBN masih berada di kisaran 4,2 persen- 4,9 persen. Saya berharap defisit 4,5 persen supaya *soft landing* sampai di 2023 dan APBN normal di 3 persen defisit," pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana menaikkan tarif PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10 persen. Ada dua opsi yang diajukan oleh pemerintah, pertama meningkatkan tarif sampai dengan 15 persen. Kedua, skema multi tarif PPN. Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan indikator ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dalam penyusunan RAPBN 2022 sebesar 5,2 persen sampai dengan 5,8 persen. Sementara inflasi berada di kisaran 2,0 sampai 4,0 persen. ■  
pun/sf

# Masyarakat Maluku Utara Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Diundangkan

**S**etelah melakukan diskusi, sosialisasi dan serap aspirasi tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021, Anggota Badan Legislasi DPR RI Taufik Basari mengungkapkan, masyarakat Maluku Utara mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan bisa segera diundangkan. Selain Maluku Utara, terdapat delapan provinsi dan 85 kabupaten/kota tengah memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan, daerah-daerah tersebut berciri khas daerah kepulauan dan pesisir pantai.

“Maluku Utara ini merupakan daerah kepulauan. Ada harapan dari peserta yang hadir, agar kita

Dengan adanya RUU ini, diharapkan pembangun nasional bisa diarahkan pada pembangunan berbasis kepulauan, termasuk juga dalam hal pengaturan keuangan dan sebagainya. Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, konsekuensi dari RUU Daerah Kepulauan adalah persoalan anggaran, nantinya ada alokasi anggaran khusus.

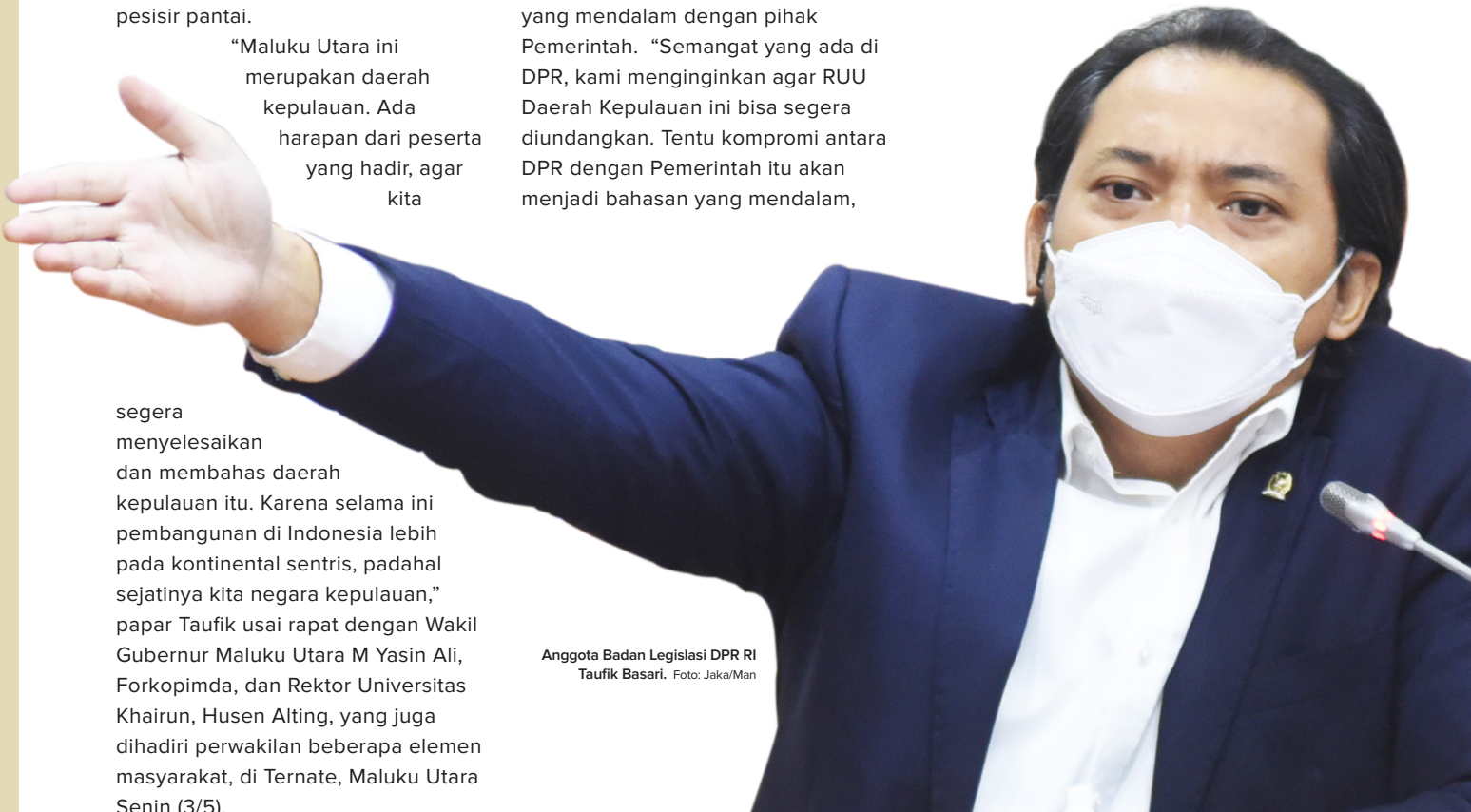
Dia mengatakan, soal anggaran harus mempertimbangkan beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi hambatan, oleh sebab itu masih membutuhkan diskusi yang mendalam dengan pihak Pemerintah. “Semangat yang ada di DPR, kami menginginkan agar RUU Daerah Kepulauan ini bisa segera diundangkan. Tentu kompromi antara DPR dengan Pemerintah itu akan menjadi bahasan yang mendalam,

kami juga butuh masukan dari masyarakat, terutama di daerah kepulauan ini,” jelasnya.

Taufik juga, berharap agar diskursus tentang RUU Daerah Kepulauan ini ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi oleh segenap kampus dan masyarakat di Maluku Utara ini. “Yang jelas pesan kami pada peserta tadi adalah, kami berharap sosialisasi pada RUU Prolegnas Prioritas ini dapat dilanjutkan agar ada partisipasi masyarakat terhadap pembahasan RUU ini,” tutupnya. ■ eko/es

segera menyelesaikan dan membahas daerah kepulauan itu. Karena selama ini pembangunan di Indonesia lebih pada kontinental sentris, padahal sejatinya kita negara kepulauan,” papar Taufik usai rapat dengan Wakil Gubernur Maluku Utara M Yasin Ali, Forkopimda, dan Rektor Universitas Khairun, Husen Alting, yang juga dihadiri perwakilan beberapa elemen masyarakat, di Ternate, Maluku Utara Senin (3/5).

Anggota Badan Legislasi DPR RI  
Taufik Basari. Foto: Jaka/Man



# Pembentukan DOB Mengemuka dalam Diskusi Pansus Otsus Papua



Foto bersama Tim Pansus RUU Otsus Papua DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pihak-pihak terkait di Jayapura. Foto: Oji/Man

**A**nggota Tim Pansus RUU Otsus Papua DPR RI Sulaeman Hamzah mengungkapkan bahwasanya sejumlah kepala daerah di Papua meminta agar DPR RI menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dikarenakan kondisi geografis Provinsi Papua yang sangat luas.

Politisi NasDem ini mengaku, usulan tersebut sangat realistis. Menurutnya, wilayah Papua yang sangat luas menyebabkan pelayanan

publik dan pembangunan sulit dilakukan. Untuk itu, ia minta kepada para kepala daerah yang mengusulkan DOB agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.

“Pendekatan pelayanan kepada masyarakat harus nomor satu. Pembangunan harus masuk hingga wilayah terpencil sehingga pembentukan DOB menjadi sesuatu yang realistis,” ujar Sulaeman Hamzah di Jayapura, Papua, Senin (3/5).

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar

mengungkapkan, percepatan pembentukan DOB harus dilakukan dan dimasukkan dalam revisi UU Otsus saat ini. “Terbentuknya DOB sangat membantu dan melancarkan penggunaan dana Otsus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” tukasnya.

Namun, pembentukan DOB menurutnya harus berdasarkan lima wilayah adat yang ada di Papua. Adapun wilayah adat Papua yang dimaksud yaitu wilayah Lapago, Tabi, Saireri, Animha dan Mepago. ■ oji/es

# Kesejahteraan OAP di Pelosok Sangat Minim



Pansus Otsus Papua menerima dokumen aspirasi dari *stakeholder* di Papua Barat. Foto: Sofyan/sf

**A**nggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Rico Sia mendapati informasi dari paparan Rektor Universitas Papua (Unipa) bahwa pendapatan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) di perkotaan cukup meningkat. Namun penghasilan mereka di pelosok sangat minim dan berdampak pada kesejahteraan, kesehatan hingga pendidikan. Menurutnya, permasalahan itu harus dijawab dalam revisi UU Otsus Papua.

Hal itu diungkapkan Rico usai mengikuti pertemuan Pansus Otsus Papua dan Papua Barat dengan Gubernur Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Senin (3/5). Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPR Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat, Pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Ketua Forum Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat,

”

**SETIAP 5 TAHUNAN (DANA OTSUS) DIEVALUASI KEMBALI TERKAIT PENGGUNAAN ANGGARAN DAN CAPAIANNYA**

Kapolda Papua Barat, Pangdam XIV/Kasuari, Kabinda Papua Barat, Rektor Unipa, perwakilan FKUB, serta Tim Asistensi Penyusunan RUU Otsus Papua.

“Tugas pemerintah 20 tahun yang lalu hanya menggelontorkan uang (Otsus), pelaksanaan dilakukan daerah, sehingga tidak bijak jika pemerintah pusat dianggap gagal

melaksanakan Otsus, sebab bukan pemerintah pusat yang melaksanakan. Sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membuat Papua merasa menjadi bagian dari NKRI. Revisi UU Otsus harus menjawab ketimpangan, kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

Terkait besaran dana Otsus yang menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, Rico menilai sudah cukup untuk sementara ini, dan nanti akan dikaji ulang pada periode berikutnya. “Setiap 5 tahunan (dana Otsus) dievaluasi kembali terkait penggunaan anggaran dan capaiannya. (Saat ini) Hanya revisi 2 pasal yang disampaikan pemerintah, ini perlu ditinjau kembali mengingat begitu banyaknya usulan terkait (Otsus) 20 tahun ke depan. Jadi, ada baiknya membuka ruang untuk pasal-pasal lain,” ungkap legislator dapil Papua Barat itu.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Papua (UNIPA) Meki Sagrim dalam paparannya menjelaskan betapa pentingnya kehadiran Otsus Papua dengan alokasi dana Otsus, dana bagi hasil, dan dana tambahan infrastruktur bagi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kita berharap untuk pendanaan Otsus itu dilanjutkan. Kita tidak bisa bayangkan, bagaimana jadinya pembangunan Papua Barat kalau barang (pendanaan Otsus) itu setop,” tandas Meki dalam paparannya di hadapan Tim Otsus Papua. ■ sf

# BURT DPR Jajaki RSUD Berkah Pandeglang Sebagai *RS Provider*



Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke Kantor Bupati Pandeglang, Banten. Foto: Oji/Man

**T**im Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dipimpin Wakil Ketua BURT Achmad Dimiyati

Natakusumah menjajaki kelayakan RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, Banten sebagai rumah sakit *provider* PT Asuransi Jasindo dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI serta keluarganya.

“Kunjungan ini guna mendengarkan penjelasan mengenai kesiapan fasilitas dan layanan sarana/prasarana rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada Anggota Dewan beserta keluarganya,” ungkap Dimiyati usai pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang didampingi Direktur RSUD Berkah, Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang beserta jajarannya di Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Senin (17/5).

Dari penjelasan yang disampaikan Dirut RSUD Berkah Pandeglang

”

**KITA BERHARAP PANDEGLANG SIAP DENGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RSUD YANG MEMADAI**

Kodiat Juarsa, politisi Fraksi PKS ini menilai, fasilitas yang dimiliki RSUD Berkah sudah cukup baik dan layak untuk memberikan pelayanan kepada peserta Jamkestama. Dimana, RSUD Berkah merupakan pusat rujukan se-Kabupaten Pandeglang yang berupaya melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna.

“Di daerah pemilihan Pandeglang dan Lebak ini ada enam Anggota DPR yang

mewakili, maka kita berharap ada kerja sama dengan Jasindo untuk menjadi RS Provider layanan Jamkestama. Kita hadir sebagai daya dorong terwujudnya kerja sama tersebut, supaya pemerintah daerah mempersiapkan RS dengan fasilitas dan pelayanan yang baik,” tandas legislator Dapil Banten I ini.

Dimiyati menambahkan, Pandeglang ini juga dikelilingi oleh destinasi wisata yang menarik. Seperti, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Ujung Kulon, Pantai Carita dan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan RSUD dengan pelayanan yang cepat dan prima untuk mendukung perkembangan pariwisata. “Kita berharap Pandeglang siap dengan pembangunan sarana dan prasarana RSUD yang memadai,” pungkasnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan kehormatan Tim BURT DPR. Baginya, kehadiran Anggota DPR RI menjadi pendorong agar dirinya dan jajaran Pemkab Pandeglang bekerja lebih keras dalam memajukan layanan kesehatan di RSUD Berkah.

“Harapan kami RSUD Berkah bisa bersinergi dengan Jasindo untuk menjadi RS Provider layanan Jamkestama dengan terus meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta kualitas layanan kesehatan dimasa depan,” harapnya.

Direktur RSUD Berkah Pandeglang Dokter Kodiat Juarsa menjelaskan, kapasitas ruang rawat inap sebanyak 232 tempat tidur (TT), 10 VIP, kelas 3 118 TT, Non Kelas 54 TT. IGD 27 TT. SDM struktural 10 orang, Nakes 400 orang dan Non Nakes 264 orang. Sebanyak 530 Nakes sudah divaksinasi Covid-19.

■ oji/es

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandara Husein Sastranegara, Bandung untuk memastikan kerja keprotokolannya di bandara tersebut berjalan baik. Hal ini penting untuk memudahkan mobilitas kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta Anggota DPR di provinsi tersebut.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menuturkan kerja sama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan PT Gapura Angkasa terkait fasilitas *Joumpa Lounge VIP Service* sudah berjalan baik. Namun menurut Agung, di masa pandemi ini, perlu peningkatan pelayanan dan fasilitas protokolera bagi Anggota DPR ketika berada di bandara.

"Kami sudah meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan dan fasilitas protokolera bagi Anggota DPR di Bandara Husein Sastranegara mencakup kesiapan sarana, prasarana, SDM dan prosedur keberangkatan, faskes serta layanan *lounge*, termasuk protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Semuanya sudah berjalan baik, kami sangat terbantu dengan (layanan) *Joumpa ini*," tutur Agung usai memimpin pertemuan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/5).

Sementara terkait maraknya berita terkait penggunaan alat tes Covid-19 yang digunakan secara berulang serta surat keterangan sehat palsu, Agung minta otoritas bandara dapat mengantisipasi hal itu, agar pengguna jasa transportasi udara merasa aman dan nyaman. Terakhir, legislator F-Demokrat itu mengatakan bahwasannya wabah Covid-19 masih belum mereda sehingga masyarakat diingatkan untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang baru (*new normal*) dengan selalu menerapkan 3M.

Senada, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti juga meminta pihak bandara untuk lebih memperketat pemeriksaan surat keterangan sehat bagi penumpang serta menjamin kerja sama dengan pihak-pihak lain terkait

# BURT Tinjau Fasilitas dan Layanan Bandara Husein Sastranegara



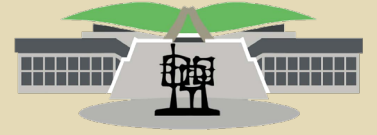
Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin pertemuan di Bandara Husein Sastranegara. Foto: Ria/Man

layanan tes Covid-19. "Jangan sampai kejadian tes antigen menggunakan alat bekas terjadi lagi, ini perlu segera diantisipasi karena akan memberikan risiko terhadap penumpang lain," tegasnya.

Sementara terkait layanan *Joumpa Lounge*, legislator F-Gerindra ini menuturkan layanan keprotokolera yang diberikan sudah berjalan dengan baik, namun kerja sama dengan *stakeholder* lain perlu ditingkatkan. "Kerja sama DPR dan PT Gapura Angkasa perlu ditingkatkan untuk menerapkan prinsip keadilan

bagi seluruh Anggota DPR, mengingat saat ini belum semua bandara bekerjasama dengan *Joumpa VIP Service* yang dimiliki Gapura Angkasa, padahal ini sangat membantu Anggota Dewan," tutupnya.

Turut hadir, Wakil Ketua BURT DPR Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), serta Anggota BURT lainnya yaitu, Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Puti Guntur Sukarno (F-PDI Perjuangan), Ilham Pangestu (F-Golkar), Lasmi Indaryani (F-Demokrat), Rian Firmansyah (F-NasDem) dan Wartiah (F-PPP). ■ rnm/sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima dokumen KEM-PPKF Tahun 2022 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5). Foto: Tim/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin Halal Bihalal secara hybrid (hadir fisik dan virtual) pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5). Foto: Oji/nvl



Inspektur II Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura beserta Grup Tari Parlemen saat menarik paduan tarian lokal dan internasional di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Rabu (19/5). Foto: Oji/nvl

